

Nama Provinsi	Laki-laki						Perempuan						Total		
	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Tanaman Kehutanan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tumbuhan/Satwa Liar	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Pemungutan Hasil Hutan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Tanaman Kehutanan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tumbuhan/Satwa Liar	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Pemungutan Hasil Hutan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Tanaman Kehutanan	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Tumbuhan/Satwa Liar	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Pemungutan Hasil Hutan
11. ACEH	8.178	641	8.819	4.569	320	4.889	204	27	231	331	16	347	2.811	266	3.077
12. SUMATERA UTARA	16.688	2.652	19.340	11.307	2.131	13.438	1.149	188	1.337	728	32	760	4.739	533	5.272
13. SUMATERA BARAT	21.951	7.418	29.369	18.460	7.123	25.583	230	32	262	584	33	617	2.881	246	3.127
14. RIAU	6.479	404	6.883	1.151	122	1.273	188	15	203	709	20	729	4.502	248	4.750
15. JAMBI	11.136	1.360	12.496	9.872	1.306	11.178	194	12	206	643	23	666	471	17	488
16. SUMATERA SELATAN	24.429	1.915	26.344	21.109	1.785	22.894	347	27	374	1.371	36	1.407	1.639	77	1.716
17. BENGKULU	10.048	765	10.813	9.204	718	9.922	86	11	97	348	5	353	416	32	448
18. LAMPUNG	61.487	5.442	66.929	59.828	5.398	65.226	308	6	314	732	18	750	574	15	589
19. KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2.652	209	2.861	611	50	661	48	2	50	266	9	275	1.746	148	1.894
21. KEPULAUAN RIAU	2.054	58	2.112	173	11	184	78	3	81	138	7	145	1.648	32	1.680
31. DKI JAKARTA	50	19	69	38	12	50	1	-	1	-	-	-	-	-	-
32. JAWA BARAT	510.484	80.374	590.858	501.823	80.018	581.841	1.552	69	1.621	5.770	200	5.970	2.216	88	2.304
33. JAWA TENGAH	893.436	152.164	1.045.600	882.849	151.440	1.034.289	1.635	127	1.762	5.206	286	5.492	5.944	392	6.336
34. DI YOGYAKARTA	128.936	29.925	158.861	128.558	29.882	158.440	217	25	242	431	36	467	102	4	106
35. JAWA TIMUR	709.162	121.472	830.634	691.663	120.209	811.872	2.516	238	2.754	11.129	559	11.688	5.479	442	5.921
36. BANTEN	98.819	11.767	110.586	97.278	11.629	108.907	270	11	281	679	13	692	706	105	811
51. BALI	24.042	1.941	25.983	23.668	1.924	25.592	118	9	127	231	7	238	118	5	123
52. NUSA TENGGARA BARAT	28.175	3.623	31.798	25.089	3.491	28.580	347	42	389	1.113	36	1.149	1.927	71	1.998
53. NUSA TENGGARA TIMUR	182.167	31.338	213.505	170.884	29.294	200.178	108	6	114	650	35	685	15.135	2.628	17.763
61. KALIMANTAN BARAT	8.664	1.015	9.679	2.075	216	2.291	256	46	302	760	30	790	5.663	717	6.380
62. KALIMANTAN TENGAH	19.447	2.121	21.568	11.264	1.445	12.709	299	54	353	879	35	914	7.403	612	8.015
63. KALIMANTAN SELATAN	5.974	556	6.530	2.000	234	2.234	46	1	47	741	21	762	3.147	291	3.438
64. KALIMANTAN TIMUR	3.353	220	3.573	1.464	133	1.597	206	13	219	392	8	400	1.243	56	1.299
65. KALIMANTAN UTARA	2.514	128	2.642	747	67	814	71	12	83	216	13	229	1.579	44	1.623
71. SULAWESI UTARA	10.659	884	11.543	9.089	828	9.917	77	14	91	883	9	892	761	32	793
72. SULAWESI TENGAH	9.893	405	10.298	4.238	274	4.512	225	9	234	625	11	636	4.848	108	4.956
73. SULAWESI SELATAN	67.762	8.591	76.353	63.297	8.211	71.508	209	32	241	472	15	487	4.131	345	4.476
74. SULAWESI TENGGARA	43.921	7.972	51.893	41.848	7.830	49.678	106	22	128	529	10	539	1.875	122	1.997
75. GORONTALO	3.689	246	3.935	2.907	234	3.141	70	4	74	202	1	203	546	6	552
76. SULAWESI BARAT	8.763	874	9.637	7.806	844	8.650	116	2	118	208	5	213	716	24	740
81. MALUKU	11.861	1.072	12.933	3.828	336	4.164	372	12	384	1.620	40	1.660	6.678	701	7.379
82. MALUKU UTARA	1.951	158	2.109	732	62	794	64	4	68	462	21	483	720	71	791
91. PAPUA BARAT	3.100	263	3.363	168	12	180	194	19	213	1.953	82	2.035	1.030	165	1.195
92. PAPUA BARAT DAYA	4.229	351	4.580	54	6	60	39	3	42	1.428	39	1.467	3.098	303	3.401
94. PAPUA	1.710	184	1.894	480	102	582	158	17	175	680	23	703	495	47	542
95. PAPUA SELATAN	22.321	2.634	24.955	177	27	204	75	4	79	5.433	329	5.762	18.021	2.382	20.403
96. PAPUA TENGAH	11.444	950	12.394	36	44	80	725	51	776	1.026	148	1.174	9.960	747	10.707
97. PAPUA PEGUNUNGAN	28.465	3.303	31.768	323	42	365	59	2	61	585	64	649	27.664	3.219	30.883
TOTAL	3.010.093	485.414	3.495.507	2.810.667	467.810	3.278.477	12.963	1.171	14.134	50.153	2.275	52.428	152.632	15.341	167.973

Metadata Indikator	
Nama	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Kehutanan
Definisi	Banyaknya pengelola usaha kehutanan yang memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.

Metadata Indikator	
Satuan	Orang
Manfaat	Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan kehutanan
Interpretasi	Semakin besar angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengusahakan kehutanan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang mengusahakan tanaman kehutanan dan melakukan penangkaran tumbuhan/satwa liar, serta pemungutan hasil hutan dan/atau perburuan dan penangkapan satwa liar pada 1 Mei 2023 dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar.
Disaggregasi	Wilayah, Jenis Kelamin
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).
Nama	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Budi Daya Tanaman Kehutanan
Definisi	Banyaknya pengelola usaha kehutanan khususnya usaha budi daya tanaman kehutanan yang memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
Satuan	Orang
Manfaat	Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan budi daya tanaman kehutanan
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengusahakan budi daya tanaman kehutanan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan budi daya tanaman kehutanan pada 1 Mei 2023 dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar.
Disaggregasi	Wilayah, Jenis Kelamin
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).
Nama	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Penangkaran Tumbuhan/Satwa Liar
Definisi	Banyaknya pengelola usaha kehutanan khususnya usaha penangkaran tumbuhan/satwa liar pada 1 Mei 2023 yang memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
Satuan	Orang
Manfaat	Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan penangkaran tumbuhan/satwa liar
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengusahakan penangkaran tumbuhan/satwa liar.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan penangkaran tumbuhan/satwa liar pada 1 Mei 2023 dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar.
Disaggregasi	Wilayah, Jenis Kelamin
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan

Metadata Indikator	
Ukuran	Total
Konsep	Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).
Nama	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Perburuan dan Penangkapan Satwa Liar
Definisi	Banyaknya pengelola usaha kehutanan khususnya usaha perburuan dan penangkapan satwa liar pada 1 Mei 2023 yang memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
Satuan	Orang
Manfaat	Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan perburuan dan penangkapan satwa liar
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengusahakan perburuan dan penangkapan satwa liar.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan perburuan dan penangkapan satwa liar pada 1 Mei 2023 dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar.
Disagregasi	Wilayah, Jenis Kelamin
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).
Nama	Jumlah Pengelola Usaha Pertanian Perorangan Pemungutan Hasil Hutan
Definisi	Banyaknya pengelola usaha kehutanan khususnya usaha pemungutan hasil hutan pada 1 Mei 2023 yang memiliki tanggung jawab teknis dan ekonomi dalam unit usaha, serta dapat melakukannya sendiri secara langsung atau dapat mempekerjakan orang lain untuk melakukannya.
Satuan	Orang
Manfaat	Untuk mengetahui data jumlah pengelola usaha pertanian perorangan pemungutan hasil hutan
Interpretasi	Semakin tinggi angka indikator menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang mengusahakan pemungutan hasil hutan.
Mekanisme perhitungan	Penjumlahan unit usaha pertanian perorangan yang melakukan pemungutan hasil hutan pada 1 Mei 2023 dengan tujuan untuk usaha, sebagian atau seluruhnya untuk dijual/ditukar.
Disagregasi	Wilayah, Jenis Kelamin
Frekuensi update	Lebih dari Dua Tahunan
Subyek	Hortikultura, kehutanan, perikanan, perkebunan, peternakan, tanaman pangan
Ukuran	Total
Konsep	Pengelola Usaha Pertanian : Orang yang memiliki tanggung jawab teknis, yuridis, dan ekonomis pada unit usaha pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan/atau kehutanan. Orang tersebut dapat melakukan semua tanggung jawab secara langsung, atau mendelegasikan yang terkait dengan pengelolaan kerja sehari-hari kepada seorang manajer (tidak berbadan hukum).

Deskripsi Klasifikasi
Klasifikasi Jenis Kelamin Merupakan Pengelompokan atau Pengkodean untuk Jenis Kelamin

Deskripsi Klasifikasi	
Laki-laki	Laki-laki (definisi jelas)
Perempuan	Perempuan (definisi jelas)
Total	Total (definisi jelas)